

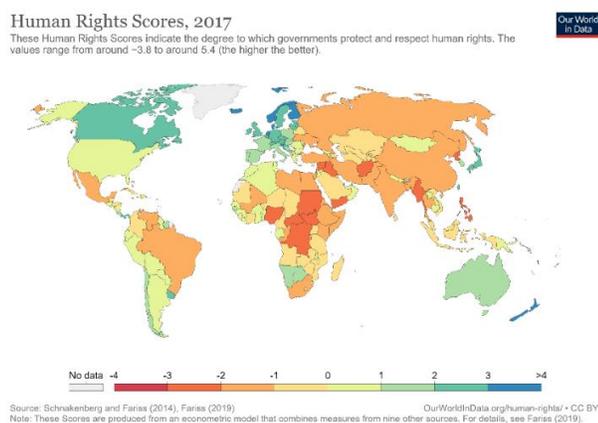
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

HAM dianggap sebagai hak moral yang fundamental dan penting yang dimiliki seseorang, dan sangat diperlukan agar manusia memiliki martabat hidup. Keberadaan dan pengakuan HAM secara universal telah tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang diproklamirkan di Paris oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Walau begitu, adanya deklarasi ini tidak menjamin bahwa tercapainya HAM yang dijunjung tinggi telah terlaksana. Masih ada pelanggaran HAM dan prinsip-prinsip HAM yang belum tercapai di berbagai negara belahan dunia. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa index yang dirilis oleh beberapa penyedia data HAM.

Salah satunya adalah data index yang dirilis oleh *our world in data*.



Gambar 1.1 Data indikasi kekuatan pemerintah di setiap negara dalam perlindungan nilai-nilai HAM tahun 2017 (*ourworldindata*, 2017).

Gambar 1.1 merupakan data yang dirilis setiap tiga tahun sekali oleh Our World in Data, yang mana program ini ditangani langsung oleh Universitas Oxford. Data terakhir adalah tahun 2017. Seperti yang ditampilkan di atas, banyak pemerintahan negara-negara di dunia yang masih lemah dalam melindungi segala macam hak-hak manusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyak warna coklat sampai merah yang ditunjukkan oleh gambar tersebut, kebanyakan di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang artinya warna coklat sampai merah adalah indikasi suatu negara masih kurang dan masih sangat lemah dalam melindungi hak-hak manusia yang hidup dalam negara tersebut (Our World in Data, 2017).

Perlindungan HAM telah menjadi cita-cita awal founding fathers negara AS, sekaligus menjadi refleksi dari pemikiran yang memimpikan agar kelak AS menjadi pedoman penegakan HAM bagi negara-negara lain di seluruh dunia. Terbukti dengan adanya *Declaration of Independence of United States*, yang mana tercantum dalam deklarasi kemerdekaan AS, sehingga jelas menempatkan AS sebagai saviour bagi eksistensi HAM, ditambah dengan adanya jaminan perlindungan HAM dalam konstitusinya. AS juga berperan dalam rancangan piagam HAM PBB yang terdiri dari 18 anggota, dilanjutkan dengan pembentukan *Commission of Human Right* oleh PBB. Pada 10 Desember 1948 sidang PBB di istana Chaillot, Paris, AS melegitimasi keabsahan *Universal Declaration of Human Rights* yang terdiri dari 30 pasal.

Berangkat dari peran AS dalam menegakkan HAM dan menjadi cita-cita penghormatan dan perlindungan nilai-nilai HAM, Industri perfilman AS, yaitu *Hollywood*, juga mulai menjadikan film-film mereka sebagai media *soft-diplomacy*. Hollywood sendiri adalah nama kota di negara bagian Los Angeles, dan juga sebagai pusat industri terbesar film AS dan yang tertua di dunia. Hollywood sendiri telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia sinema di seluruh dunia sejak awal abad ke-20 hingga sekarang (Ibis World, 2019).

Pemerintah AS tidak memiliki legitimasi terhadap pihak swasta, termasuk industri film. Namun, nilai-nilai HAM yang ditegakkan oleh AS telah banyak mempengaruhi banyak pola pikir dan perilaku masyarakat disana. Pengaruh nyata juga digunakan para sineas di AS, sehingga cita-cita AS dalam penghormatan nilai HAM juga diwujudkan oleh masyarakatnya dalam berbagai bentuk, yang mana dalam hal ini adalah sineas dan film yang memiliki banyak ide dan pergerakan atas HAM.

Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah amandemen kontrak di industri perfilman *Hollywood* yang bernama *Rider Inclusion*. Amandemen ini memiliki ketentuan bahwa di setiap proyek film yang dibuat oleh industri film *Hollywood*, harus memiliki tingkat keragaman tertentu di antara para pemain, kru film, serta esensi cerita di dalam film (Dwyer, 2018). *Rider Inclusion* juga membuat *Hollywood* dirasa akan lebih adil dan beragam dalam merekrut sineas maupun membuat cerita dalam film. Amandemen kontrak ini berfungsi dalam kasus dimana setiap sineas dapat menandatangani kontrak ketika mereka ditawarkan

dalam sebuah proyek film, dan mereka memiliki kemampuan dalam bernegosiasi untuk meminta jaminan bahwa orang-orang yang bekerja serta cerita film yang diangkat memiliki nilai keberagaman, yang mencerminkan demografi nyata, seperti kesetaraan gender, minoritas, LGBTQ, dan disabilitas (Judkis, 2018).

Industri film biasanya melakukan globalisasi dengan cara memperluas pasar dan distribusi, serta mengambil keuntungan yang sifatnya global. Hal ini terlihat di sebagian besar dalam industri film, tidak lain karena adanya kompetisi global dari sesama studio produksi film yang sama-sama berperan begitu besar terhadap media hiburan dan mendapatkan pengakuan khalayak internasional, karena keberhasilan industri film *Hollywood* bisa dicapai dengan adanya pengakuan global (Sliwinski, 2015).

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan dalam film serta para sineas. Untuk subjek HAM yang akan dibahas, penulis akan memfokuskan kepada 4 nilai, yaitu rasial, kesetaraan gender, hak anti diskriminasi LGBT, dan hak anak.

Penelitian terkait film yang digunakan sebagai media penyebaran suatu nilai dan identitas, banyak dianalisis dari sisi penyebaran serta efeknya terhadap masyarakat. Mark Lorenzen dalam *On the Globalization of the Film Industry* (2008), menganalisis bahwa industri film sejatinya memiliki tujuan untuk spesialisasi dan internasionalisasi yang nantinya mengglobal hingga memiliki permasalahan yang kompleks dari segi globalisasi. Alon Lazar dalam *Human*

Rights Movies Through the Prism of Movie Advisory Boards (2019), membahas dari sisi pendidikan, dan menekankan bahwa isu HAM yang diangkat dalam suatu kisah dalam film memang memiliki efek tersendiri bagi suatu masyarakat. Jessica Julia McGill Peters dalam *American Cinema as Cultural Diplomacy: Seeking International Understanding One Film at a Time* (2015), menganalisis bahwa Film kerap digunakan oleh negara AS sebagai rangkaian diplomatik budaya ke negara lain sebagai penyebaran terhadap ide-ide tentang Amerika, imperialisme dan interaksi diplomatik, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan perluasan diplomatik AS.

Penulis melihat bahwa penelitian terdahulu terkait film sebagai media penyebaran nilai HAM memiliki kekurangan dan celah yang sebenarnya dapat diteliti lebih lanjut. Penelitian sebelumnya tidak memfokuskan industri film mana yang berperan sebagai penyebar nilai HAM, nilai-nilai HAM apa saja yang dicoba industri film untuk disebar, serta karya-karya atau film-film mana saja yang memiliki pesan tersirat sebagai penyebaran nilai HAM. Dari celah ini, penulis akan menganalisis dari sudut pandang industri film di *Hollywood* dengan mengkhususkan penelitian dalam lingkup karya film yang berfungsi sebagai media penyebaran nilai HAM serta efeknya terhadap masyarakat luas.

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini berusaha menyajikan analisis film-film di industri perfilman *Hollywood* yang memiliki dampak langsung atas nilai-nilai HAM bagi masyarakat luas.

1.2. Rumusan Masalah

Hal yang kemudian dirumuskan menjadi masalah dalam penelitian ini untuk dijawab antara lain: bagaimana peran film-film di industri *Hollywood* dalam menyebarkan nilai-nilai HAM?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni mengungkap makna mengenai penyebaran nilai-nilai HAM dari media film, khususnya film industri *Hollywood*, serta memaparkan beberapa film yang mengandung dan berdampak pada nilai HAM di dunia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan akademis dalam bidang hubungan internasional, khususnya dalam kajian film yang dapat berpengaruh terhadap nilai HAM di dunia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia internasional dan juga komunitas perfilman terkait hubungan yang erat antar keduanya yang dapat berpengaruh satu sama lain.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Post Strukturalis

Menurut Campbell, poststrukturalisme memandang kekuasaan bersumber dari pemikiran manusia, yang mana dengan memupuk pikiran manusia dengan ilmu pengetahuan akan membantu manusia tersebut dalam meraih kekuasaan, sehingga interpretasi dan representasi penting dalam pemikiran kaum poststrukturalis. Poststrukturalisme juga memiliki tema tentang bahasa yang mempengaruhi konstruksi *discourse* dan eksistensi negara. *Discourse* berarti sebuah praktek tentang bagaimana suatu pemahaman dilahirkan sehingga perlu beberapa aspek yang dilihat seperti historis, politik, ekonomi, dan sosial. Kaum poststrukturalis memiliki keyakinan bahwa *science* sangat berkaitan erat dengan kekuatan atau *power*. Namun *power* yang dimaksudkan disini bukan semata-mata hanya merupakan tindakan yang represif, tetapi *power* yang dimaksudkan juga *power* yang produktif oleh karena pengenaan batas dan kendala (Campbell, 2007: 203-228).

Menurut Jackson dan Sorensen, para penstudi poststrukturalisme menekankan bahwa perspektif tradisional yang ada telah membentuk dogma atau pola pikir mengenai politik internasional. Pola pikir yang terbentuk hanya terkonstruksi karena adanya suatu kekuasaan yang dipegang oleh representatif. Pengetahuan yang ada mencerminkan kepentingan dari pengamat seperti kelompok, partai, atau kelas tertentu. Kesimpulannya adalah Ilmu Pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi manusia (Jackson & Sorensen, 2013: 406-417).

Menurut Ashley, bagi kaum post strukturalis, Identitas yang dimiliki oleh para aktor dalam hubungan internasional juga akan mempengaruhi bagaimana cara para aktor bertindak dalam fenomena dunia internasional yang ada. Sama halnya dengan pengetahuan, identitas bagi kaum post-strukturalis juga berkaitan erat dengan *power*. Pengetahuan yang dimiliki oleh para aktor, akan menghasilkan suatu identitas, kemudian identitas tersebut akan mempengaruhi tata cara berpikir dan berperilaku para aktor dalam hubungan internasional. Menurut poststrukturalis, sifat manusia yang dapat dilihat sekarang ini adalah hasil bentukan suatu struktur yang berlaku, bukan merupakan suatu pemberian Tuhan yang ada sejak lahir (Ashley, 1996: 240-253).

Jenny Edkins berpandangan bahwa ilmu pengetahuan dan kekuatan memiliki suatu korelasi yang bersifat interaksionis dimana ilmu pengetahuan dapat memengaruhi kekuasaan dan kekuasaan juga dapat memengaruhi ilmu pengetahuan yang terdapat dalam suatu struktur internasional. Poststrukturalisme juga pada dasarnya sangat menentang logosentrisme yang menyatakan bahwa manusia mampu menemukan pengetahuan dan kebenaran tunggal yang absolut (Edkins, 2007: 88-98). Rosi Braidotti menambahkan bahwa konstelasi dari ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan tersebut bergantung pada budaya dan bahasa yang menjadi alat untuk melakukan penyebaran ilmu pengetahuan tersebut (Braidotti, 2014: 55-61).

Hal ini didukung oleh Choat, dimana poststrukturalisme memiliki agenda berupa usaha untuk melakukan dekonstruksi terhadap ilmu pengetahuan dengan menggunakan budaya dan bahasa sebagai alat utama dalam melakukan konstruksi suatu ilmu pengetahuan. Kaum poststrukturalis beranggapan bahwa ilmu pengetahuan merupakan suatu hasil dari proses konstruksi yang terjadi karena eksistensi dari proses negasi asumsi dasar, pola pemikiran logis, dan penggunaan budaya dan bahasa untuk menyatakan ilmu pengetahuan. Kaum poststrukturalis juga memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan suatu modal bagi setiap aktor untuk melakukan konstruksi atau mendapatkan kekuatan selama pelaksanaan hubungan internasional berlangsung dan kekuatan merupakan suatu medium yang dapat digunakan oleh para aktor hubungan internasional untuk melakukan penetrasi terhadap nilai, pola pemikiran, dan berbagai hal lain yang terdapat dalam suatu ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam poststrukturalis memandang bahwa kekuatan dan ilmu pengetahuan merupakan dua hal yang bersifat interaksionis karena kedua hal tersebut dapat saling memengaruhi (Choat, 2010: 12-19).

1.6. Definisi Konseptual

1.6.1. Bahasa & Representasi

Post-strukturalis berasumsi tentang pentingnya interpretasi dan representasi dalam politik internasional. Peran interpretasi dan representasi tidak terhindarkan dan sangat diperlukan dalam politik internasional. Layaknya konstruktivisme, poststrukturalisme percaya fakta sosial yang ada bukan bersifat

given, melainkan suatu hasil interpretasi dan representasi dari manusia sendiri. Tema utama dalam postrukturalisme adalah bahasa dan budaya. Bahasa adalah yang membentuk ilmu pengetahuan yang pada akhirnya masuk secara dipaksakan ke dalam masyarakat. Demikianlah hal ini yang kemudian disebut dengan *discourse*. Setiap Individu berhak memiliki identitas bahasa yang berbeda yang masing-masing bahasa dapat mereka tentukan sendiri (Ashley, 1996: 240-253).

Bahasa merupakan unsur intrinsik yang memegang peranan penting dalam bertindak dan memberikan makna dalam suatu realitas sosial (Jackson dan Sorensen, 2013: 406-417). Menurut Foucault, kehidupan individu yang modern saat ini merupakan hasil dari adanya sejarah. Kaum postrukturalis memiliki keyakinan bahwa pengetahuan atau science sangat berkaitan erat dengan kekuasaan (Campbell, 2007: 203-228).

Derrida menurunkan peran bahasa yang menurutnya hanya sekedar tulisan yang tidak memaksa penggunaannya. Derrida juga melihat bahwa lembaga sosial/Institusi tak lain hanya sebagai tulisan (bahasa), karena itu tak mampu memaksa orang. Konteks yang berlainan memberikan kata-kata dengan arti yang berlainan pula. Akibatnya sistem bahasa tak mempunyai kekuatan memaksa terhadap orang. Karena itu menurut Derrida, mustahil bagi ilmuwan untuk menemukan hukum umum yang mendasari bahasa. Ia mengkritik masyarakat pada umumnya yang diperbudak oleh logosentrisme (Ritzer & Goodman, 2004: 655). Makna bahasa adalah sesuatu yang tidak stabil, yang selalu tergelincir

dalam prosesnya, tidak hanya dibatasi pada kata, kalimat atau teks tertentu yang bersifat tunggal, namun hasil hubungan antar teks (Barker, 2004: 20).

Perluasan studi ke dalam bahasa menunjukkan bahwa poststrukturalisme melibatkan aspek yang berbeda dalam studi hubungan internasional. Hal ini membantu untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja secara eksplisit melalui media bahasa yang kemudian diciptakan melalui wacana. Wacana tidak bisa dihindari dengan keterlibatan interpretasi. Dalam poststrukturalisme, interpretasi sangat penting untuk menganalisis masalah politik karena merupakan salah satu cara penting untuk melakukan penelitian tentang hubungan internasional. Konsep interpretasi ini relevan untuk memahami politik internasional modern. Interpretasi akan berguna sebagai alat analisis dalam hubungan internasional untuk menafsirkan makna di balik wacana tersebut. Hal ini juga akan memberikan perspektif baru tentang berbagai masalah politik (Doty, 1993, 297-320).

Menurut pandangan Michel Foucault, realitas terkonstruksi secara sosial melalui medium bahasa. Fokus pemikiran Foucault adalah bagaimana suatu diskursus bahasa menjadi dominan dan memonopoli makna serta kebenaran. Selain itu, kekuasaan bersifat produktif dan menyebar ke seluruh hubungan sosial yang menghasilkan berbagai kemungkinan bentuk perilaku, dan juga membatasi perilaku. Pelaksanaan kekuasaan itu sendiri menciptakan dan menyebabkan kemunculan objek-objek baru pengetahuan dan mengakumulasi bentuk-bentuk baru dari informasi. Relasi antara kekuasaan dan pengetahuan ini

menciptakan diskursus dominan yang menjelma menjadi kebenaran yang dikehendaki pemegang kekuasaan dan dipercayai oleh khalayak (Foucault dalam Rosyidin, 2020: 148-150).

1.7. Definisi Operasional

1.7.1. Bahasa & Representasi

Dalam penelitian ini, bahasa dan representasi digunakan sebagai alat untuk menguak dan memaparkan setiap adegan, dialog yang mengandung makna dan representasi. Makna bahasa dan representasi tersebut berisi nilai-nilai sosial, konstruksi sosial, budaya, dan nilai HAM. Setiap adegan, dialog, dan interaksi dalam film akan dipaparkan sebagai bentuk bukti bahwa di dalam media film, terdapat bahasa yang menyampaikan pesan tertentu, serta representasi yang memindahkan realitas sosial ke dalam bentuk seni film.

1.8. Argumen Utama

Film adalah salah satu bentuk karya yang menggunakan medium bahasa sebagai cara bertuturnya. Ketika berbicara bahasa film, tentu evolusi bahasa dalam film di dominasi oleh wacana barat yang sering menyampaikan pesan historis, politik, sosial dan budaya dari masyarakat barat sesuai dengan kultur mereka. Di era kontemporer, industri film dikuasai oleh AS melalui Hollywood. Dengan dominasi mereka dalam industri perfilman, Hollywood mengkonstruksi ekosistem perfilman dengan nilai-nilai dan kultur budaya AS, seperti nilai-nilai liberal yang terkandung dalam HAM. Hegemoni Hollywood yang memberikan ruang bagi film

berkonteks nilai HAM menjadikan industri mereka berpengaruh dan memiliki efek yang signifikan terhadap nilai HAM di berbagai belahan dunia.

1.9. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode Discourse Analysis. Tipe dan metode ini digunakan dalam penelitian ini dikarenakan memungkinkan peneliti untuk melakukan penggambaran suatu fenomena secara mendalam melalui proses pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 6 film sebagai sampel penelitian. 6 film tersebut ialah; *Lion* (2016), *Little Women* (2019), *Lady Bird* (2016), *Black Panther* (2018), *Call Me by Your Name* (2017), *The Imititation Game* (2014). Adapun teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut:

1.9.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data menggunakan metode studi literatur dengan kajian kepustakaan menggunakan sumber data merujuk pada film, jurnal, buku, website, dan berita internasional. Peneliti akan menggunakan metode studi pustaka terhadap literatur-literatur yang mendukung dan berkaitan dengan film-film dan sineas film *Hollywood* yang berperan menyebarkan nilai HAM, serta dalam mengungkap arti sosial dalam film melalui medium bahasanya.

1.9.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Discourse Analysis* atau Analisis Wacana. Analisis Wacana sendiri ialah suatu

kajian yang meneliti atau menganalisa bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan (struktur pesan dalam komunikasi), serta menekankan kajian penggunaan dalam konteks sosial, khususnya dalam interaksi antar penutur (Pawito, 2007: 170). Metode ini dipilih karena dapat mengungkap pesan tekstual maupun konstektual dalam film Hollywood dengan detail melalui pemakaian medium bahasa dalam interaksi dan konteks penggambaran sosial yang di dalamnya. Metode ini juga memungkinkan penulis untuk melihat bagaimana pesan melalui medium bahasa diorganisir, digunakan, dan dipahami. Dengan metode ini, data terkait industri film Hollywood yang berperan menyebarkan nilai HAM dikumpulkan, diseleksi, serta akan dikupas yang kemudian akan analisis dan dikaitkan dengan kerangka pemikiran yang sudah dikemukakan sebelumnya.

1.10. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang informasi umum mengenai Negara AS yang menjunjung tinggi nilai HAM, dan sedikit informasi mengenai *Hollywood* yang berupaya untuk membawa perubahan sosial melalui media film, serta memaparkan kerangka dari penelitian ini.

Bab II akan memaparkan deskripsi analitis serta tinjauan umum mengenai isu film sebagai realitas politik. Data-data yang didapatkan akan menjelaskan mengenai bagaimana film membawa pesan-pesan politik, khususnya pesan HAM dalam ranah Hubungan Internasional.

Bab III berisi pemaparan deskripsi analitis mengenai bagaimana industri *Hollywood*, yang membuat karya-karya film yang mengandung cerita berkaitan dengan

nilai-nilai sosial, keadilan dan HAM, serta bagaimana hubungan antara film-film *Hollywood* yang disebutkan nanti, dengan efek perubahan dinamika dan pergerakan nilai sosial HAM dari hasil film, selain itu, pada bab ini juga akan mengkaitkan permasalahan dengan teori yang sudah dikemukakan sebelumnya. Data penjelasan *Hollywood* yang berperan sebagai media penyebaran nilai HAM, akan didukung dengan penjelasan teori poststrukturalisme, khususnya konsep bahasa dan representasi.

Terakhir adalah bab IV yang merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran. Bab ini akan menjelaskan mengenai informasi singkat yang bersifat menyeluruh tentang *Hollywood* yang berperan menyebarkan nilai HAM, dan juga untuk memberikan rekomendasi pada penelitian-penelitian selanjutnya.